

**ANALISIS PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN 2007-2016 KOTA BATU**
*Analysis Of Education Budget Allocations Development In Regional Government
Budget (APBD) Batu City Years 2007-2016*

**Indriani
Nurul Ulfatin
Desi Eri Kusumaningrum**

**e-mail: indria2094@gmail.com
Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No 5 Malang 65145**

Abstract: This research has objectives (1) the percentage of education budget of APBD year 2007-2016, (2) describe the level of education budget in APBD, (3) the amount of education budget for education expenditure and (4) and educational activities funded of APBD years 2007-2016. The research method of quantitative descriptive analysis, using the data of the total APBD statistics for the calculation by Microsoft Excel, a technique used in analyzing data to describe or describe of numbers obtained from raw data collected into scores for easy reading and concluded.

Keywords: *budget revenues, budget education, and expenditure*

Abstrak: Penelitian ini mempunyai tujuan (1) mengetahui jumlah persentase anggaran pendidikan APBD tahun 2007-2016, (2) mengetahui atau mendeskripsikan tingkat nilai perkembangan anggaran pendidikan dalam APBD, (3) mengetahui jumlah distribusi APBD pendidikan untuk belanja pendidikan, dan (4) mengetahui program dan kegiatan pendidikan yang dibiayai oleh APBD dari tahun 2007-2016. Metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif, menggunakan data jumlah keseluruhan APBD statistik untuk penghitungan dengan cara *Microsoft Excel*, teknik yang digunakan dalam menganalisis data untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data berupa angka yang diperoleh dari data mentah dikumpulkan menjadi skor untuk memudahkan dibaca dan disimpulkan.

Kata Kunci: anggaran pendapatan, anggaran pendidikan, dan belanja

Perkembangan zaman semakin pesat dan menjadikan harapan akan adanya pendidikan dapat membawa ke arah menuju kemajuan bangsa. Hal tersebut didasari oleh adanya pemikiran, bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci terpenting

dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya dengan memperhatikan biaya pendidikan yang menjadi pokok utama dalam pencapaian penyelenggaraan proses pendidikan. Adapun tujuan dalam hal ini, yaitu agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai dengan adanya dukungan dan juga peran serta pemerintah atas ketersediaan dana pendidikan, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD untuk pendidikan sudah dianggarkan dari penerimaan dan belanja daerah, dengan maksud setiap anggaran sudah ada pada tujuan masing-masing guna menunjang penyelenggaraan proses pendidikan, dalam APBD anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam mendayagunakan sumber daya APBD.

Menurut Mardiasmo (2005:61), “anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah”. Sedangkan menurut Nordiawan (2007:39), “APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan oleh peraturan daerah”. Dalam hal tersebut, APBD merupakan proses pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sekaligus untuk menangani permasalahan pada bidang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

APBD merupakan rencana atau penyusunan keuangan tahunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas anggaran, rencana kerja pemerintah daerah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam ketetapan Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut, pemerintah daerah mengelola anggaran yang berkaitan dengan bidang pendidikan atau kebutuhan setiap perencanaan dalam

pencapaian anggaran yang berkaitan dengan pembiayaan. Pemerintah pusat telah melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 yang mewajibkan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional, yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi, yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Anggaran Pendidikan tidak akan berpengaruh pada penghapusan sekolah dengan predikat RSBI (Rintisan Sekolah Berstandart International). Hal ini dapat dilihat pada anggaran APBD untuk pendidikan pada Kota Batu tetap dialokasikan sebesar 20 persen sesuai dengan undang-undang. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batu, bahwa, “ada RSBI atau tidak, anggaran pendidikan tidak boleh berubah. APBD harus mengalokasikan sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan. Kita tidak bisa merubah itu, karena sudah menjadi amanat undang-undang”, ungkap Wito Argo (dalam Malang Post, Tahun 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui perkembangan yang terjadi pada Kota Batu, karena pada dasarnya pendapatan ekonomi setiap daerah berbeda-beda dan kebijakan pemerintah yang memberlakukan 20% anggaran pendidikan dari APBD. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis perkembangan dari tahun ke tahun pada alokasi anggaran pendidikan, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perkembangan Alokasi Anggaran Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007-2016 Kota Batu”. Untuk itu, peneliti ingin melakukan penelitian ini dengan tujuan apakah APBD Kota Batu sudah memenuhi aturan dari pemerintah, sehubungan dengan hal tersebut dapat mendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan jumlah data keseluruhan APBD 2007-2016 statistik untuk penghitungan dengan cara *Microsof Excel*, teknik yang digunakan dalam menganalisis data untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data berupa angka yang diperoleh dari data mentah dikumpulkan menjadi skor untuk memudahkan dibaca dan disimpulkan. Dalam penelitian ini terdapat variabel, yaitu APBD, Alokasi Anggaran dan jumlah persentase. APBD meliputi: Belanja Modal, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dari kedua instrumen tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai analisis perkembangan APBD Kota Batu dengan cara pengumpulan data memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi mengelola angka-angka yang diperoleh dari skor mentah menjadi skor yang mudah dibaca dan disimpulkan

HASIL

APBD yang dialokasikan untuk pendidikan di Kota Batu pada Tahun 2007-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel Alokasi Dana APBD Pendidikan Kota Batu

Tahun Anggaran	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)	Total APBD Kota Batu (Rp)	%
2007	32.141.231.967,00	22.742.343.000,00	54.316.435.967,00	265.568.501.308,53	20,67
2008	44.572.686.088,00	24.802.136.316,00	69.374.822.404,00	311.999.327.571,76	22,24
2009	15.307.969.685,00	24.145.980.000,00	39.453.949.685,00	376.450.562.449,00	10,48
2010	94.363.091.778,00	22.942.680.000,00	117.305.771.778,00	381.641.840.855,00	30,74
2011	102.940.452.543,00	32.019.356.000,00	134.959.808.543,00	438.801.057.262,00	30,76
2012	116.765.133.809,00	24.085.277.000,00	140.850.410.809,00	464.125.306.700,00	30,35
2013	132.644.779.173,00	40.644.352.525,00	173.289.131.698,00	451.873.836.407,00	38,35
2014	154.190.312.308,00	35.846.565.095,00	190.036.877.403,00	678.600.450.633,00	28,00
2015	161.175.757.024,00	42.420.831.178,00	203.596.588.202,00	723.545.986.211,25	28,14
2016	158.472.539.561,00	34.553.210.792,00	193.025.750.353,00	826.995.638.282,88	23,34

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Catatan: Lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran.

Berdasarkan pada tabel Alokasi anggaran APBD pendidikan Kota Batu pada tahun 2007-2016, dapat diketahui persentase sepuluh tahun terakhir dalam bidang

pendidikan mengalami perubahan setiap tahun kondisi yang tidak stabil setiap tahun terdapat perubahan, guna mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan setiap tahun anggaran sebagaimana di atas, maka dalam DPA (Dinas Pertimbangan Agung)/DPPA (Dinas Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Kota Batu pada tahun 2007 dialokasikan anggaran Rp. 54.316.435.967,00. Yang terdiri atas Belanja Langsung sebesar Rp. 22.175.204.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 32.141.231.967,00 sampai sepuluh tahun terakhir pada tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 193.025.750.353,00. Yang terdiri atas Belanja Langsung Rp. 34.553.210.792,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp. 158.472.539.561,00.



Dapat diketahui gambar persentase anggaran pendidikan 2007-2016 (sepuluh tahun) dalam setiap tahun mengalami fluktuasi dengan maksud persentase anggaran terhadap pendidikan mengalami naik turun, persentase alokasi pada tahun 2007 sebesar 20,45% selanjutnya pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 22,24%, penurunan tahun 2009 sebesar 10,48%, selanjutnya pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar 30,74%, tahun 2011 sebesar 30,76%, tahun 2012 sebesar 30,35%, kenaikan pada tahun 2013 yaitu sebesar 38,35%, penurunan pada tahun 2014 sebesar 28,00%, tahun 2015 sebesar 28,14, dan terakhir pencapai tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 23,34%. Pada program pendidikan yang alokasi

pendidikan terutama untuk program pendidikan formal, dimana pendidikan yang mewajibkan (sembilan tahun dan menengah).

Perkembangan Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2007-2016 Kota Batu

Alokasi anggaran APBD pada bidang pendidikan minimal sebesar 20% sesuai dengan peraturan perundang-undang yang bertujuan untuk mendukung dan harapan semua kegiatan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan berkaitan dengan pendidikan. Menurut bapak Marwan selaku staf pengelola anggaran Dinas Pendidikan Kota Batu, pedoman dalam pengelokasian anggaran APBD pada bidang pendidikan menggunakan acuan bagaimana cara atau menciptakan pendidikan yang bermutu, dan penuntasan wajib belajar pendidikan 12 tahun sehingga selaras dengan tujuan Kota Batu. (Koding W/PA/SP/20/07/2017, lampiran 19, halaman 172)

Perkembangan alokasi anggaran pendidikan dimulai pada tahun 2007 sampai 2016, dengan 10 tahun terakhir dapat dikatakan perkembangan yang fluktuasi, Menurut bapak Fajar selaku staf Keuangan Daerah menjelaskan sebenarnya mengalami peningkatan tiap tahun namun hanya saja semua kembali pada kebutuhan, dilihat dari perkembangan PAD dan DAU, dari situlah kami terima dan dibandingkan dalam kebutuhan, tetapi setiap tahun mengalami peningkatan di Kota Batu (W/BK/KD/21/07/2017 lampiran 19, halaman 175). Perkembangan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Sehubungan dengan tersebut, maka dapat diketahui berapa tinggi nilai perkembangan alokasi anggaran pendidikan yaitu pada tahun 2007 sebesar Rp.54.316.435.967,00 (20,45%), 2008 sebesar Rp. 69.374.822.404,00 (22,24%), selanjutnya pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp. 39.453.949.685,00 (10,48%), tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar Rp. 117.305.771.778,00 (30,74%), tahun 2011 sebesar Rp. 134.959.808.543,00 (30,76%), tahun 2012 Rp. 140.850.410.809 (30,35%), tahun 2013 sebesar Rp. 173.289.131.698,00 (38,35%), tahun 2014 sebesar Rp. 190.036.877.403 (28,00) tahun 2015 sebesar Rp. 203.596.588.202,00 (28,14%) dan terakhir pada tahun 2016 sebesar Rp.193.025.750.353,00 (23,34%), dari situlah dapat diketahui perkembangan dana untuk pendidikan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Bahwa pada jumlah perkembangan alokasi anggaran pendidikan tertinggi selama sepuluh tahun terakhir

mengalami penurunan dan kenaikan, sehubungan dengan hal tersebut maka dapat diketahui berapa besar anggaran pendidikan dalam APBD Kota Batu pada tahun 2012 sebesar 38,35 %.

Distribusi untuk Belanja Pendidikan Tahun 2007-2016 Kota Batu

Pada tahun 2007 distribusi belanja langsung biaya yang banyak dikeluarkan untuk Belanja Modal sebesar 51,89%, pada tahun 2008 biaya yang dikeluarkan masih sama yaitu Belanja Modal sebesar 60,90%, tahun 2009 pengeluaran biaya paling banyak pada Belanja Barang dan Jasa sebesar 69,24%, tahun 2010 pengeluaran banyak sebesar 63,78% Belanja Modal, tahun 2011 pengeluaran terbesar untuk Belanja Modal sebesar 43,30%, tahun 2012 distribusi pendidikan pengeluaran untuk Belanja Modal sebesar 56,68%, tahun 2013 pengeluaran banyak untuk Belanja Modal sebesar 52,10%, tahun 2014 distribusi pengeluaran sebesar 40,37% untuk Belanja Barang dan Jasa, tahun 2015 pengeluaran distribusi pendidikan untuk Belanja Modal sebesar 44,58%, dan pada tahun terakhir 2016 pengeluaran distribusi pendidikan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 50,31%. Menurut bapak Fajar (Koding W/BK/KD/21/07/2017, lampiran 19, halaman 175), menjelaskan bahwa sudah sesuai dengan kepengurusan (job) masing-masing tiap bidang tim anggaran, kalau untuk pendistribusian sudah baik, tidak mengalami kendala karena rencana kerja sudah jelas. Karena usulan dari SKPD yang terkait dalam rencana kerja diselenggarakan oleh tim anggaran. Belanja Langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal selama 10 tahun terakhir di mulai pada tahun 2007-2016 belanja yang banyak dikeluarkan pada Belanja Modal pada tahun 2009 sebesar 69,24%, Belanja Modal merupakan belanja pengadaan bisa komputer, pengadaan mebeulair, pengadaan peralatan dapur, pengadaan alat-alat laboratorium, bisa juga pengadaan konstruksi atau pembelian bangunan, dan untuk pengadaan buku/kepuustakaan. Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2016 sebesar 50,31%, meliputi belanja bahan habis pakai, belanja jasa kantor, belanja sewa, belanja perjalanan dinas, dan belanja transportasi dan akomodasi. Belanja pegawai pengeluaran terbesar pada tahun 2007 sebesar 39,28% untuk honorarium PNS, Non PNS, dan uang lembur. Menurut Marwan selaku staf pengelola anggaran Kota Batu

menjelaskan bahwa, pengeluaran dari belanja langsung dan belanja tidak tergantung pada kebutuhan dan menyesuaikan, untuk pendistribusian alokasi dana pendidikan, sudah tepat pada sasaran.

Pembiayaan Program Pendidikan Tahun 2007-2016 di Kota Batu

APBD mengartikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mefokuskan untuk program pendidikan, dimana pendidikan harus terarahkan dan tercapai sebagai standart pendidikan, dengan kualitas mutu khususnya sektor pendidikan tinggi dalam perkembangan zaman, selanjutnya anggaran untuk pendidikan tidak hanya untuk membiayai sekolah saja melainkan untuk program yang direncanakan oleh pemerintah Kota Batu. Alokasi dana APBD pada bidang pendidikan minimal 20% sesuai peraturan perundang-undang bertujuan untuk mendukung semua kegiatan yang berkaitan khususnya bidang pendidikan. Pengalokasian dana APBD pendidikan berpedoman menggunakan acuan menciptakan pendidikan yang unggul dan memajukan sesuai tujuan Kota Batu. ada program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batu dapat dilihat rinci di lampiran 18 halaman 187.

Alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2007 sebesar Rp. 54.316.435.967,00 ; Tahun 2008 sebesar Rp. 69.374.822.404,00 ; Tahun 2009 sebesar Rp. 39.453.949.685,00 ; Tahun 2010 sebesar Rp. 117.305.771.778,00 ; Tahun 2011 sebesar Rp. 134.959.808.543,00; Tahun 2012 sebesar Rp. 140.850.410.809,00 ; Tahun 2013 sebesar Rp. 173.289.131.689,00 ; Tahun 2014 sebesar Rp. 190.036.877.403,00 ; Tahun 2015 sebesar Rp. 200.596.588.202,00; dan terakhir pada Tahun 2016 sebesar Rp. 193.025.750.353,00. Pada tabel 4.12 Program dari Belanja Langsung yang ada di setiap SKPD yaitu Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program peningkatan kapasitas aparatur. Sedangkan program belanja langsung yang ada yaitu program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar sembilan tahun, program pendidikan jenjang menengah, program pendidikan non formal, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan, program manajemen pelayanan pendidikan, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, program peningkatan peran serta kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dan yang terakhir program pengembangan wawasan kebangsaan.

PEMBAHASAN

Persentase Anggaran Pendidikan dalam APBD Tahun 2007-2016 Kota Batu

Sehubungan dengan hasil penelitian yang sudah disajikan pada Bab IV, maka diketahui besar persentase anggaran pendidikan dalam APBD pada tahun 2007 sampai dengan 2016 di Kota Batu. Dari hasil penelitian, bahwa APBD mengalokasikan dana pada sektor pendidikan tahun 2007 sebesar Rp. 54.883.574.967,00 dari total APBD Kota Batu sebesar Rp. 265.568.501.308,00 Oleh karena itu dapat diketahui berapa persentase anggaran pendidikan yang sudah dianggarkan pada tahun 2007, yaitu sebesar 20,67%.

Perkembangan Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD 2007-2016 Kota Batu

Perkembangan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dalam APBD Kota Batu pada tahun 2007-2016 adalah nilai tercapainya tingkat perkembangan setiap tahun dilihat dari penggunaan sesuai kebutuhan, guna untuk memenuhi tercapainya tujuan, target kerja, dan program Kota Batu. APBD merupakan laporan keuangan daerah yang mencakup “pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana”, (Yuwono, dkk (2008:92). Sedangkan menurut Basri (2003:26) dalam perkembangannya, menurut kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

- a. pembiayaan fungsional (*functional finance*);
- b. pengelolaan anggaran (*the managed budget approach*);
- c. stabilisasi anggaran otomatis (*the stabilization budget*); dan
- d. anggaran belanja seimbang (*balanced budget approach*).

Dengan maksud setiap perkembangan terdapat beda-beda dalam pembiayaan, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran, dan belanja seimbang. Pada bab IV dijelaskan bahwa perkembangan anggaran dimulai tahun 2007-2010 mengalami fluktuasi yang dimana perkembangan tidak stabil terjadi peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya selama sepuluh tahun terakhir, yaitu tahun 2007 sebesar (20,45%), 2008 sebesar (22,24%), selanjutnya pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar (10,48%), tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar (30,74%), tahun 2011 sebesar (30,76%), tahun 2012 (30,35%), tahun 2013 sebesar (38,35%), tahun 2014 sebesar (28,00%) tahun 2015 sebesar (28,14%) dan terakhir pada tahun 2016 sebesar (23,34%), pada sepuluh tahun terakhir ini terjadi perkembangan yang meningkat dan ada kalanya perkembangan mengalami penurunan.

Distribusi APBD untuk Belanja Pendidikan Kota Batu

Distribusi APBD dalam pendidikan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan guna untuk kegiatan penyaluran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Fattah (2009:23), bahwa “biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan belajar yang dikeluarkan oleh pemerintah, orangtua, dan siswa itu sendiri, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh orangtua untuk keperluan diluar sekolah. Sedangkan Menurut Halim (2004:73), “Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum”. tahun 2007-2016 untuk Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Pada tahun 2007 distribusi belanja langsung biaya yang banyak dikeluarkan untuk Belanja Modal sebesar 51,89%, pada tahun 2008 biaya yang dikeluarkan masih sama yaitu Belanja Modal sebesar 60,90%, tahun 2009 pengeluaran biaya paling banyak pada Belanja Modal 69,24%, tahun 2010 pengeluaran banyak sebesar 63,78% Belanja Modal, tahun 2011 pengeluaran terbesar untuk Belanja Modal sebesar 43,30%, tahun 2012 distribusi

pendidikan pengeluaran untuk Belanja Modal sebesar 56,68%, tahun 2013 pengeluaran banyak untuk Belanja Modal sebesar 52,10%, tahun 2014 distribusi pengeluaran sebesar 40,15% untuk Belanja Modal, tahun 2015 pengeluaran distribusi pendidikan untuk Belanja Modal sebesar 44,58%, dan tahun terakhir 2016 pengeluaran distribusi pendidikan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 50,31%. Dari sepuluh tahun distribusi APBD pendidikan pada tahun 2007-2016 untuk belanja rata-rata pengeluaran terbesar pada Belanja Modal.

Program Pendidikan yang dibiayai APBD Tahun 2007-2016 Kota Batu

Adapun komponen biaya pendidikan yang dikemukakan oleh Abdullah (2008:3), bahwa komponen pendidikan terdiri dari:

Pendidikan kegiatan belajar-mengajar, pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan pembinaan kegiatan siswa, kesejahteraan, rumah tangga sekolah, biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan, pembinaan rumah tangga kependidikan, pengadaan alat-alat belajar, pengadaan bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, sarana sekolah, pembinaan siswa, pengelolaan sekolah, prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan dan pendistribusian, prosedur investasi, prosedur pemeriksaan, laju perkembangan pendidikan yang lamban, tuntutan masyarakat adanya perbaikan dalam sistem pendidikan nasional, kebijakan pemerintah untuk menampung semua anak umur 7-12 tahun ditingkat pendidikan dasar dan mensukseskan wajib belajar 9 tahun, peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, keterkaitan dan kepadanan antara pendidikan dan kebutuhan pembangunan, dan peningkatan kemampuan dalam menguasai Ilmu Pendidikan Teknologi (IPTEK).

Program pendidikan adalah rencana atau targer yang akan dicapai dengan kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali namun berkesinambungan, realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. Belanja langsung yang ada di setiap SKPD yaitu Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program peningkatan kapasitas aparatur. Sedangkan program belanja langsung yang ada yaitu program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar sembilan tahun, program pendidikan jenjang menengah, program pendidikan non formal, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program pengembangan budaya

baca dan pembinaan perpustakaan, program manajemen pelayanan pendidikan, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, program peningkatan peran serta kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dan yang terakhir program pengembangan wawasan kebangsaan. Alokasi anggaran khususnya untuk kegiatan dan program dari dana alokasi pendidikan pada tahun 2007-2016, sebesar Rp.203.596.588.202,00 tercapai sampai pada 28,14%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu 20 % dianggarkan untuk sektor pendidikan tahun anggaran 2007-2016, besar persentase 10 tahun terakhir pada tahun 2013 sebesar 38,35%, dan terendah pada tahun 2009 sebesar 10,48%, 2) Perkembangan nilai anggaran pendidikan tahun 2007-2016 mengalami fluktuasi, dengan maksud setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan, 3) Distribusi APBD pendidikan untuk belanja pendidikan, meliputi untuk belanja langsung meliputi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal), dan belanja tidak langsung meliputi (gaji guru dan tunjangan guru), 4) Program dan Kegiatan Pendidikan yang dibiayai APBD Kota Batu meliputi: program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan non formal, program pendidikan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, program manajemen pelayanan pendidikan, program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, program peran serta kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda,

program peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan sampai pada program pengembangan wawasan kebangsaan.

SARAN

Dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada pemerintah Kota Batu. 1) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya DPRD yang mengatur kebijakan-kebijakan pendidikan di Kota Batu, hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan perkembangan untuk biaya sekaligus mutu pendidikan yang ada di Kota Batu pada tahun selanjutnya, 2) Bagi Kepala Pemerintah Daerah Kota Batu dapat digunakan sebagai bahan referensi, dalam hal memperbaiki peningkatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batu, 2) Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, supaya lebih mempertahankan dan memperhatikan sekolah, sekaligus menambah program-program pendidikan agar dapat melanjutkan generasi penerus bangsa yang maju unggul serta diharapkan tepat pada sasaran dalam pengalokasian dan pendistribusian anggaran pendidikan, 4) Bagi Masyarakat Kota Batu dapat mengetahui sumber apa saja yang menunjang proses pembiayaan pada bidang pendidikan, 5) Bagi Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan dapat menambah referensi dan untuk mengidentifikasi persoalan penganggaran pendidikan pada tingkat lokasi, 6) Bagi Peneliti Selanjutnya, peneliti ini digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai penganggaran pendidikan, serta diharapkan dapat mengembangkan dari peneliti agar lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah. 2008. *Konsep dan Analisis Biaya Pendidikan (online)*, (<http://massofa.wordpress.com>. Diakses 28 Januari 2015)
- Argo, W. Maret 2016. Pegang Teguh Konsep Kota Agropolitan. *Malang Post*, hlm.3.
- Basri, F. 2003. *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fattah, N. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Halim, A & K, S. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2005. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nordiawan, D. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 17-18 tentang Keuangan Negara*.
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas)*. Bandung: Citra Umbara.
- Yuwono, S., Utomo, D.C., Zein, S. & Azrafiana, A. R. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang: Banyumedia Publishing.